

## Anteseden Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ira Setyowati<sup>1</sup>, Nur Laila Yuliani<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas, Muhammadiyah  
Magelang, Indonesia

\*email: nurlailay.feb@ummgl.ac.id

---

### ABSTRACT

**Keywords:**  
External  
Pressure,  
Management  
Commitment,  
Accessibility,  
Presentation of  
financial  
statements,  
qualitative  
Characteristics,  
Internal Control  
and  
transparency.

*This study aims to examine the effect of External Pressures, Management Commitment, Accessibility, the Presentation of Financial Statement, Qualitative Characteristics, and Internal Control on the Transparency of Regional Financial Report. This study takes from a sample of employees who work in the regional organization of Temanggung Regency. The number of samples of this study consisted of 118 respondents based on the "purposing sampling" method, namely the head of the financial, administration and planning sub-division, and also ODP staff holder. Hypothesis testing in this study uses multiple linear regression. The results showed that management commitment and internal control had a positive effect on the transparency of local government financial reports. While external pressures, accessibility, presentation of financial statements and qualitative characteristics do not affect the transparency of financial statements.*

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, Aksesibilitas, Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan sampel pegawai yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Temanggung. Jumlah sampel penelitian ini adalah 118 responden, berdasarkan metode *purposive sampling*, yaitu kepala subbagian keuangan atau penatausahaan dan perencanaan, serta staf pemegang kas OPD. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen manajemen dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan tekanan eksternal, aksesibilitas, penyajian laporan keuangan dan karakteristik kualitatif tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan.

---



## PENDAHULUAN

Isu transparansi laporan keuangan di Indonesia saat ini sangat meningkat. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor yaitu adanya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah karena otonomi daerah, adanya peningkatan kasus korupsi di Indonesia. Transparansi merupakan suatu keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Andriyani, 2016). Transparansi harus dilakukan pemerintah karena sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas seluruh kegiatan operasional pemerintah.

Indonesia pada tahun 2019 memperoleh nilai 40 dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh *transparency international*. Indonesia memperoleh peringkat ke 85 dari 180 negara yang disurvei (Transparency International The Global Qualition Against Corupption, 2020). Berdasarkan hasil tersebut Indonesia masih disebut dengan negara dengan kasus korupsi yang tinggi. Dimana terdapat 271 kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp8.4 triliun. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia banyak dilakukan oleh aparatur sipil negara di lembaga pemerintah kabupaten (AntiKorupsi, 2020). Kasus korupsi yang marak terjadi ini menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dalam mengelola sumber daya publik. Maka dari itu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, pemerintah daerah perlu melakukan transparansi atas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat.

Bentuk transparansi laporan keuangan salah satunya adalah opini audit yang disampaikan oleh BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam *website* resmi pemerintah Kabupaten Temanggung opini audit yang diperoleh sejak tahun 2012 sampai 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (TemanggungKab, 2019). Hasil opini audit tersebut disampaikan oleh BPK RI melalui laporan Hasil Pemeriksaan untuk Kabupaten Temanggung. Di raihnya opini WTP secara berturut-turut ini menjadikan Kabupaten Temanggung memperoleh penghargaan *KIP Award* pada tahun 2019 (Kominfo, 2019). Dalam ajang *KIP Award* Pemerintah Kabupaten Temanggung dianugerahkan menjadi Badan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menuju informatif.

Transparansi atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung saat ini belum dilakukan secara maksimal (Pemkab Temanggung, 2020), karena dalam laman resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk laporan pengelolaan keuangan masih kurang lengkap dan laporan yang disampaikan masih dalam bentuk acak serta terpisah. Hal tersebut mengakibatkan pengguna laporan keuangan susah dalam memahami laporan keuangan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten

Temanggung. Selain itu, penyampain laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung kurang tepat waktu karena laporan keuangan untuk tahun 2018 belum ada yang disampaikan dalam laman *website* resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung (Pekab Temanggung, 2020).

Penelitian mengenai transparansi laporan keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko dan Setiawan (2020), Fathmaningrum dan Mukti (2019), Pradita, dkk (2019), Wirawan, dkk (2019), Lubis (2017), Noprizal (2017) dan Yunas (2016) menemukan bahwa tekanan eksternal mempengaruhi transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian yang dilakukan Davici (2016), Dewi, dkk (2015) dan Berlin (2015) yang menunjukkan bahwa tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan.

Penelitian Jatmiko dan Setiawan (2020), Fathmaningrum dan Mukti (2019), Andriyani (2016) dan Pradita, dkk (2019) menemukan bahwa komitmen manajemen berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian Wirawan, dkk (2019) dan Lubis (2017) menemukan bahwa komitmen manajemen tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Jatmiko dan Setiawan (2020), Wirawan, dkk (2019), Apriliani, dkk (2015), Hehanussa (2015), Saragih (2015) serta Aliyah dan Nahar (2012) meneliti tentang pengaruh Aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Yuliani (2017) yang menemukan bahwa aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian tentang pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Nurrizkiana, dkk (2017), Apriliani, dkk (2015), Hehanussa (2015), Saragih (2015) serta Aliyah dan Nahar (2012) menemukan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian yang dilakukan oleh Wirawan, dkk (2019) dan Yuliani (2017) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Wirawan, dkk (2019), Yuliani (2017) dan Apriliani, dkk (2015) menemukan bahwa karakteristik kualitatif berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktarika (2017) yang menemukan bahwa karakteristik kualitatif tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian variabel pengendalian internal dilakukan oleh Fathmaningrum dan Mukti (2019), Yuliani (2017), Oktarika (2017), Asroel (2016), serta Amelia (2015) yang menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Namun berbeda dengan penelitian Wirawan, dkk

(2019) yang menemukan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh tekanan eksternal, komitmen manajemen, aksesibilitas, penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif, dan pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu secara lebih spesifik tentang transparansi laporan keuangan di Pemerintah sehingga memperoleh hasil audit WTP dari sisi variabel yang akan diuji.

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Temanggung. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* (pemilihan sampel bertujuan). Kriteria sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah Pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan dan perencanaan pada OPD serta staf pemegang kas OPD.

### Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

**Tabel 1. Definisi dan Pengukuran Variabel**

Variabel	Definisi	Pengukuran
1. Transparansi Keuangan	Laporan Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi yang terkait dengan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan (Andriyani, 2016).	Menggunakan instrumen yang diacu dari Yuliani (2017) terdiri dari 8 butir pernyataan dengan indikator: 1. Kemudahan akses laporan keuangan, 2. Ketepatan waktu menyelesaikan laporan keuangan, 3. Fasilitas keterbukaan informasi yang diberikan untuk masyarakat, 4. Pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan daerah. Variabel diukur dengan skala likert 1-5.
2. Tekanan Eksternal	Tekanan eksternal merupakan tekanan yang berlebihan bagi manajemen untuk memenuhi persyaratan atau harapan pihak ketiga (Yunaz, 2016).	Menggunakan instrumen yang diacu dari Purnamasari & Handayani (2015) terdiri dari 5 butir pernyataan dengan indikator sebagai berikut: 1. Terbitnya undang-undang dan peraturan tentang transparansi, 2. Tuntutan pihak-pihak terkait, 3. Tekanan media masa, 4. Kritik dari masyarakat, 5. Perhatian lembaga kemasyarakatan, 6. Tuntutan Pengusaha dan komunitas bisnis. Variabel diukur dengan menggunakan skala likert 1-5.

3. Komitmen Manajemen	Komitmen manajemen merupakan kemampuan individu untuk menyerasikan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi (Fathmaningrum & Mukti, 2019).	Menggunakan instrumen yang diacu dari Purnamasari & Handayani (2015) terdiri dari 5 butir pernyataan dengan indikator: 1. Keinginan manajemen puncak, 2. Membenahi kemampuan dan ketrampilan staf, 3. Integritas yang tinggi, 4. Membangun budaya etis, 5. Kebutuhan OPD. Variabel diukur dengan skala likert 1-5.
4. Aksesibilitas keuangan	laporan Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemampuan untuk memberikan akses bagi <i>stakeholder</i> untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi <i>stakeholder</i> (Aliyah & Nahar, 2012).	Menggunakan instrumen yang diacu dari Yuliani (2017) terdiri dari 5 butir pernyataan dengan indikator: 1. Keterbukaan dalam publikasi laporan keuangan, 2. Kemudahan akses dalam pemerolehan informasi laporan keuangan. Variabel diukur dengan skala likert 1-5.
5. Penyajian Keuangan	Laporan Penyajian laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada publik yang digunakan sebagai alat ukur kinerja manajemen di pemerintah daerah (Aliyah & Nahar, 2012)	Menggunakan instrumen yang diacu dari Yuliani (2017) terdiri dari 8 butir pernyataan dengan indikator: 1. Kesesuaian pelaporan dengan SAK, 2. Kelengkapan laporan keuangan, 3. Penggunaan basis akrual dalam pencatatan, 4. Kecukupan informasi yang ada dalam laporan keuangan. Variabel diukur dengan skala likert 1-5.
6. Karakteristik Kualitatif	Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No.1 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya atau menghasilkan informasi yang berkualitas (Yuliani, 2017).	Menggunakan instrumen yang diacu dari Yuliani (2017) terdiri dari 10 butir pernyataan dengan indikator: 1. Kelengkapan laporan keuangan, 2. Ketepatan waktu dalam menyusun laporan keuangan, 3. Keandalan laporan keuangan sebagai tolok ukur untuk penyusunan anggaran, 4. Kejujuran dalam laporan keuangan, 5. Kebebasan laporan keuangan dari kesalahan yang bersifat material, 6. Keandalan laporan keuangan. Variabel diukur dengan skala likert 1-5.
7. Pengendalian Intenal	Pengendalian internal merupakan proses pengendalian kepada seluruh aktivitas karyawan yang mana dilakukan oleh seorang pimpinan secara rutin afar kinerja dari organisasi tersebut bisa optimal	Menggunakan instrumen yang diacu dari Yuliani (2017) terdiri dari 9 butir pernyataan dengan indikator: 1. Penerapan kode etik di dalam instansi, 2. Pengawasan yang dilakukan, 3. Pembagian tugas dan jabatan,

(Fathmaningrum & Mukti, 2019)	4. Penerapan manajemen risiko, 5. Kesesuaian pemberian otoritas, 6. Pengawasan kinerja, 7. Penerapan sistem informasi. Variabel diukur dengan skala liker 1-5.
-------------------------------	--

**Sumber:** data penelitian terdahulu diolah kembali

### Metode analisis Data

Sebelum melakukan analisis data dan di uji hipotesisnya, terlebih dahulu dilakukan uji validitas menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) dan uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* > 0,70 (Ghozali,2018). Uji tersebut dilakukan untuk melihat item dan keseluruhan kuesioner itu valid da reliabek atau tidak. Setelah itu baru kemudian dilakukan analisis dan pengujian hipotesis dengan menggunakan Regresi Linier Berganda, Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*), Uji F (*Goodness of Fit Test*) dan Uji t. Model ersamaan regresi linier berganda untuk penelitian ini sebagai berikut:

$$TLK = \alpha \beta 1TE + \beta 2KM + \beta 3A + \beta 4PLK + \beta 5KK + \beta 6PI + e$$

Keterangan:

TLK	=	Transparansi Laporan Keuangan
$\alpha$	=	Konstanta
$\beta$	=	Koefisien Regresi
TE	=	Tekanan Eksternal
KM	=	Komitmen Manajemen
A	=	Aksesibilitas
PLK	=	Penyajian Laporan Keuangan
KK	=	Karakteristik Kualitatif
PI	=	Pengendalian Internal

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengumpulan Data

Kuesioner yang disebar pada Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Temanggung sebanyak 148 kuesioner, akan tetapi yang dapat diolah sebanyak 118 kuesioner. Mayoritas responden dalam penelitian ini sebagian besar berusia lebih dari 40 tahun, dan berjenis kelamin perempuan. Mayoritas responden memiliki jabatan sebagai staff perencanaan dan keuangan dengan latar belakang pendidikan Strata 1. Ringkasan hasil statistik deskriptif variabel disajikan pada tabel 2:

**Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TLK	118	2	3	3	0,451
TE	118	2	5	4	0,539
KM	118	2	5	4	0,610

A	118	3	5	4	0,532
PLK	118	2	3	3	0,335
KK	118	1	3	2	0,320
PI	118	3	5	4	0,392
Valid N (listwise)	118				

Sumber: data primer (2020) diolah kembali

### Uji Validitas

Hasil uji validitas yang dilakukan memberikan nilai KMO yang diperoleh lebih dari 0,5 dan memiliki nilai *cross loading* > 0,50 berarti tingkat validitas dapat terpenuhi. Namun terdapat 21 item pernyataan atau sebesar 37,5% yang tidak valid yaitu, TLK2, TLK7, TLK8, TE1, TE2, PLK1, PLK2, PLK3, KK1, KK2, KK3, KK4, KK8, PI1, PI2, PI4, PI11, PI12, PI13, PI14, dan PI15. Pernyataan tersebut yang tidak valid tidak dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 3. Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
TLK	0,847	Reliabel
TE	0,706	Reliabel
KM	0,777	Reliabel
A	0,768	Reliabel
PLK	0,928	Reliabel
KK	0,833	Reliabel
PI	0,904	Reliabel

Sumber: data primer (2020) diolah kembali

### Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 4. Analisis Regresi Linier Berganda**

Keterangan	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-0.191	0.331		-0.576	0.566
TE	0.051	0.047	0.091	1.069	0.288
KM	0.146	0.054	0.237	2.731	0.007
A	0.115	0.063	0.163	1.829	0.070
PLK	0.055	0.064	0.084	0.861	0.391
KK	0.041	0.079	0.050	0.526	0.600
PI	0.191	0.065	0.252	2.927	0.004

Sumber: data primer (2020) diolah kembali

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda diperoleh hasil seperti pada tabel 4. Untuk persamaan regresinya sebagai berikut:

$$TLK = -0.191 + 0.051TE + 0.146KM + 0.115A + 0.055PLK + 0.041KK + 0.191PI + e$$

## Pengujian Hipotesis

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 5. Uji  $R^2$**

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0.569	0.323	0.287	0.317

Sumber: data primer (2020) diolah kembali

### Uji F (*Goodness of Fit Test*)

**Tabel 6. Uji F**

Keterangan	Sum of Squares	F	Mean Square	F	Sig.
Regression	5.353	6	0.892	8.844	0.000
Residual	11.198	111	0.101		
Total	16.551	117			

Sumber: data primer (2020) diolah kembali

### Uji t

**Tabel 7. Uji t**

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
TE	1.069	1,657	0.288	H1 Tidak Diterima
KM	2.731	1.657	0.007	H2 Diterima
A	1.829	1.657	0.070	H3 Tidak Diterima
PLK	0.861	1.657	0.391	H4 Tidak Diterima
KK	0.526	1.657	0.600	H5 Tidak Diterima
PI	2.927	1.657	0.004	H6 Diterima

Sumber: data primer (2020) diolah kembali

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Tekanan Eksternal terhadap Transparansi Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa  $t_{hitung} = 1,069 < t_{tabel} = 1,657$  dan  $p\text{ value} = 0,288 > \alpha = 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan sehingga **H<sub>1</sub> tidak diterima**. Hal ini diartikan bahwa tekanan yang berasal dari luar OPD seperti peraturan pemerintah, tuntutan walikota atau bupati, masyarakat, LSM dan sebagainya tidak mampu dalam memaksa pejabat OPD untuk melakukan transparansi. Adanya tekanan berupa legitimasi yang kuat dan konsekuensi hukum yang ada tidak menyadarkan pegawai OPD dalam menjalankan aktivitas organisasi untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan.

Hasil ini tidak sesuai dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa adanya tekanan dari pihak eksternal berupa peraturan atau kebijakan lain akan meningkatkan transparansi laporan keuangan. Adanya tekanan eksternal seharusnya dapat membuat seluruh anggota organisasi melakukan proses kegiatan operasional dengan semestinya. Seharusnya tekanan yang berasal dari luar organisasi belum mampu meningkatkan pemahaman organisasi dalam beralih ke peraturan yang baru, sehingga transparansi laporan keuangan pemerintah daerah tidak dapat diwujudkan. Penelitian ini sesuai

dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2015), Berlin (2015) dan Davici (2016) yang menunjukkan bahwa tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

## 2. Pengaruh Komitmen Manajemen terhadap Transparansi Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa  $t \text{ hitung} = 2,731 > t \text{ tabel} = 1,659$  dan  $p \text{ value} = 0,007 < \alpha = 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan sehingga **H<sub>2</sub> diterima**. Hal ini diartikan bahwa semakin tinggi komitmen manajemen dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan, karena kesadaran internal manajemen sendiri yang mencari transparansi laporan keuangan. Tanpa kesadaran dari manajemen transparansi akan sulit untuk ditingkatkan. Perbaikan keterampilan dan pendidikan staf terutama pada fungsi keuangan dapat menangani perubahan peraturan merupakan proses dalam mewujudkan transparansi laporan keuangan.

Penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa adanya komitmen yang dibangun oleh kepala daerah bersama anggota organisasi agar dalam meningkatkan transparansi berhasil. Komitmen yang melekat pada staf di OPD sudah berhasil diterapkan oleh kepala daerah. Adanya perbaikan dalam ketrampilan staf terutama di bagian keuangan dan pendidikan berkelanjutan dalam menangani perubahan lingkungan juga dilakukan untuk mewujudkan transparansi laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Andriyani, (2016), Jatmiko dan Setiawan (2020) dan Fathmaningrum, (2019) yang menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan.

## 3. Pengaruh Aksesibilitas terhadap Transparansi Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa  $t \text{ hitung} = 1,829 > t \text{ tabel} = 1,657$  dan  $p \text{ value} = 0,070 > \alpha = 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan sehingga **H<sub>3</sub> tidak diterima**. Hal ini diartikan bahwa sarana penunjang dalam mewujudkan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik yang transparan belum terwujud. Selain itu, laporan keuangan yang tidak memiliki akses yang baik bagi pengguna menyebabkan penyajian laporan keuangan menjadi tidak relevan dan tidak aksesibel sehingga dapat menurunkan kualitas transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi, karena aksesibilitas tidak mampu meminimalisir masalah ketidakseimbangan informasi yang terjadi dalam OPD dengan penerapan *bonding cost*. Aksesibilitas yang tidak baik akan menambah kecurigaan pihak-pihak tertentu terhadap kecurangan-kecurangan dalam pelaporan yang sering terjadi, sehingga hal tersebut tidak dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani

(2017) yang menunjukkan bahwa aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **4. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Laporan Keuangan**

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa  $t_{hitung} = 0,861 < t_{tabel} = 1,659$  dan  $p\ value = 0,391 > \alpha = 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan sehingga **H<sub>4</sub> tidak diterima**. Hal ini diartikan bahwa penyajian laporan keuangan yang menjadi salah satu bentuk kebutuhan dari transparansi laporan keuangan yang menjadi syarat akuntabilitas pemerintah atas aktivitasnya belum dilakukan secara maksimal. Tidak disajikannya informasi tentang laporan keuangan secara utuh menyebabkan sulit dicapainya transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini tidak sesuai dengan teori agensi yang menerapkan *bonding cost* untuk mewujudkan transparansi laporan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa pihak prinsipal dan agen cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan individu bukan untuk kepentingan umum. Akibatnya transparansi laporan keuangan pemerintah daerah sulit untuk dicapai. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wirawan, dkk (2019) dan Yuliani (2017) yang menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **5. Pengaruh Karakteristik Kualitatif Terhadap Transparansi Laporan Keuangan**

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa  $t_{hitung} = 0,526 < t_{tabel} = 1,657$  dan  $p\ value = 0,600 > \alpha = 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa karakteristik kualitatif tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan sehingga **H<sub>5</sub> tidak diterima**. Hal ini diartikan bahwa penyajian yang dilakukan dalam OPD masih belum disampaikan secara jujur dan tepat waktu. Selain itu laporan keuangan yang disampaikan tidak dapat dibandingkan dan bahasa yang digunakan tidak mudah dipahami oleh pengguna. Laporan keuangan yang tidak berkualitas menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan sulit untuk ditingkatkan.

Penelitian ini tidak sesuai dengan teori agensi dikarenakan penerapan mekanisme *bonding cost* yang diterapkan tidak berjalan. Masih banyaknya OPD yang tidak menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Hal tersebut menyebabkan laporan keuangan disajikan menjadi tidak berkualitas yang mengakibatkan para pengguna laporan keuangan susah dalam memahami laporan tersebut. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktarika (2017) yang menunjukkan bahwa karakteristik kualitatif tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **6. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan**

Berdasarkan hasil pengujian diketahui  $t_{hitung} = 2,927 > t_{tabel} = 1,657$  dan  $p\ value = 0,004 < \alpha = 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa pengendalian internal

berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan sehingga **H<sub>6</sub> diterima**. Hal ini diartikan bahwa semakin baik pengendalian internal dalam OPD akan meningkatkan transparansi laporan keuangan. Adanya penerapan kode etik pada setiap instansi, staf yang kompeten dan mudah menerima perubahan dan adanya pembagian tugas yang terstruktur merupakan bentuk kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini sesuai dengan teori agensi karena pengendalian internal yang telah dilakukan menjadi solusi dalam mengurangi masalah ketidakseimbangan informasi dengan penerapan *monitoring cost*. Adanya penerapan *monitoring cost* dapat mengurangi masalah keagenan dapat berkurang karena adanya pengendalian dan pengawasan dari pihak internal. Adanya pengendalian internal yang tinggi memiliki dampak pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien kegiatan operasional serta menciptakan laporan keuangan yang andal dan transparan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathmaningrum dan Mukti (2019), Yuliani (2017), Oktarika (2017), Asroel (2016), serta Amelia (2015) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh tekanan eksternal, komitmen manajemen, aksesibilitas, penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif, dan pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Temanggung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 118 pegawai yang menjalankan tugas dan fungsi bagian keuangan dan perencanaan beserta staff dan pemegang kas OPD. Temuan hasil penelitian ini komitmen manajemen dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan tekanan eksternal, aksesibilitas, karakteristik kualitatif dan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, S., & Nahar, A. (2012). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*.
- Andriyani, L. (2016). Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, Ketidakpastian Lingkungan, Gaya Kepemimpinan, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan. *JOM Fekon*, 204-218.
- AntiKorupsi*. (2020, April 5). Diambil kembali dari Tren Penindakan Kasus Korupsi 2019: <https://antikorupsi.org/id/trends/tren-penindakan-kasus-korupsi-2019>

- Fathmaningrum, E. S., & Mukti, G. B. (2019). Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Akuntabilitas, Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora (JSEH)*, 140-150.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jatmiko, B., & Setiawan, M. B. (2020). The Effect of External Pressure, Management Commitment, and Accessibility Toward Transparency of Financial Reporting. *Journal of Accounting and Investment*, 114-124.
- Kominfo, T. (2019). *Temanggung Kembali Raih Penghargaan KIP Award Tahun 2019*. Temanggung: Kominfo Kabupaten Temanggung.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.
- Pemkab Temanggung. (2020, April 17). Diambil kembali dari Laman Temanggung Kab: <https://laman.temanggungkab.go.id/info/detail/11/67/keuangan.html>
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*.
- Purnamasari, W., & Handayani, N. (2015). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-17.
- Saragih, C. A. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun. *JOM Fekon*, 1-15.
- TemanggungKab. (2019, Juni). *Temanggung Raih WTP Yang Ke 7*. Temanggung: Laman TemanggungKab. Diambil kembali dari Laman TemanggungKab.
- Transparency International The Global Qualition Against Corruption*. (2020, April 5). Diambil kembali dari Corruption Perceptions Indeks 2019: <https://www.transparency.org/cpi2019?/news/feature/cpi-2019>
- Ulum, I., & Sofyani, H. (2016). *Akuntansi (Sektor) Publik*. Malang: Aditya Media Publishing.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 103*.
- Wirawan, R. C., Yuliani, N. L., & Purwantini, A. H. (2019). Antensedan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Pemerintah Daerah Kota Magelang. *Wahana Riset Akuntansi*, 1551-1566.
- Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas, dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Ekono (JBE)*, 1-14.
- Yunaz, A. R. (2016). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Organisasi dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap

Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kampar. *JOM Fekon*, 1549-1607.